

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemberdayaan merupakan suatu proses untuk meningkatkan kemampuan, kemandirian, serta posisi individu maupun kelompok agar mampu mengenali potensi, menentukan pilihan, mengambil keputusan, dan bertindak dalam menyelesaikan persoalan yang dihadapi. Pemberdayaan tidak hanya dipahami sebagai pemberian bantuan dari pihak luar, tetapi sebagai proses penguatan kapasitas yang memungkinkan pihak yang diberdayakan memiliki ruang, kemampuan, dan tanggung jawab yang lebih besar terhadap kehidupannya sendiri. Dalam perspektif pembangunan, pemberdayaan diarahkan agar masyarakat mampu memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara lebih efektif, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, serta mengurangi ketergantungan terhadap pihak lain secara bertahap (Mardikanto & Soebianto, 2017).

Konsep pemberdayaan berkembang menjadi pemberdayaan masyarakat, yaitu proses yang menempatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan dan bukan semata-mata sebagai penerima program. Pemberdayaan masyarakat berupaya memperkuat pengetahuan, keterampilan, kepercayaan diri, kelembagaan, serta kemampuan kolektif masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam menentukan dan menjalankan kegiatan yang berkaitan langsung dengan kepentingan mereka. Karena itu, proses pemberdayaan menuntut adanya partisipasi yang nyata, pembelajaran bersama, penguatan organisasi lokal, serta dukungan yang mendorong masyarakat mampu mengelola persoalannya secara lebih mandiri dan berkelanjutan (Ife et al., 2016).

Pemberdayaan masyarakat menjadi semakin penting ketika diterapkan pada masyarakat pesisir karena kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat pesisir memiliki hubungan yang sangat kuat dengan kondisi sumber daya laut dan wilayah pantai. Ketergantungan terhadap sumber daya alam membuat masyarakat pesisir tidak hanya menghadapi persoalan ekonomi, tetapi juga kerentanan terhadap perubahan lingkungan, keterbatasan akses, fluktuasi pendapatan, serta tekanan

terhadap sumber daya pesisir. Oleh sebab itu, pemberdayaan masyarakat pesisir perlu diarahkan pada peningkatan kesejahteraan sekaligus penguatan kelembagaan, partisipasi, kemampuan mengelola sumber daya, dan pemanfaatan wilayah pesisir secara berkelanjutan. Program pemberdayaan masyarakat pesisir pada dasarnya tidak cukup hanya berorientasi pada kegiatan ekonomi produktif, tetapi juga perlu membangun proses belajar, partisipasi, dan keswadayaan masyarakat dalam mengelola sumber daya yang menjadi ruang hidupnya (Kurniasari & Reswati, 2011).

Pemberdayaan masyarakat pesisir juga memiliki keterkaitan yang erat dengan upaya pelestarian lingkungan karena keberlanjutan kehidupan masyarakat pesisir sangat bergantung pada terjaganya ekosistem pantai dan laut. Masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di sekitar kawasan pesisir memiliki pengetahuan lokal, kedekatan ruang, serta intensitas interaksi yang tinggi dengan lingkungan sehingga memiliki posisi strategis dalam mendukung kegiatan konservasi. Keterlibatan masyarakat dapat diarahkan melalui edukasi, penguatan kelompok, pelatihan, pengawasan kawasan, serta pembentukan tanggung jawab kolektif. Dalam konteks konservasi penyu di pesisir selatan Jawa Barat, tanggung jawab masyarakat lokal menjadi unsur penting karena keberhasilan konservasi tidak hanya ditentukan oleh lembaga pengelola, tetapi juga oleh pengetahuan, perilaku, dan keterlibatan masyarakat yang hidup di sekitar habitat penyu (Nurhayati et al., 2020).

Salah satu sumber daya hayati pesisir yang memerlukan perhatian dalam konteks tersebut adalah penyu hijau (*Chelonia mydas*). Penyu hijau merupakan satwa laut yang memiliki fungsi ekologis penting dalam ekosistem laut dan pesisir. Di Indonesia, penyu hijau tetap termasuk jenis satwa yang dilindungi dan tercantum dalam daftar satwa dilindungi pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018. Pada tingkat global, pembaruan IUCN tahun 2025 mengubah status penyu hijau dari Endangered menjadi Least Concern setelah adanya pemulihan populasi global dalam jangka panjang. Meskipun demikian, IUCN menegaskan bahwa sejumlah subpopulasi masih berada dalam kondisi terancam dan berbagai tekanan terhadap penyu serta

habitatnya masih terus berlangsung, sehingga upaya konservasi yang berkelanjutan tetap diperlukan (IUCN, 2025).

Fenomena dan permasalahan penyu hijau di lapangan menunjukkan bahwa perbaikan status secara global tidak berarti seluruh ancaman telah berakhir pada tingkat lokal. Penyu hijau masih menghadapi tekanan berupa pengambilan telur dan penangkapan, tangkapan sampingan dalam kegiatan perikanan, pencemaran, gangguan aktivitas manusia, serta perubahan dan kerusakan kawasan pesisir yang digunakan sebagai habitat peneluran. IUCN menegaskan bahwa pemanfaatan langsung yang tidak berkelanjutan, bycatch, pembangunan pesisir, dan perubahan iklim masih menjadi sumber tekanan penting bagi penyu hijau (IUCN, 2025). Di pesisir selatan Jawa Barat, penelitian Nurhayati et al. (2020) juga menunjukkan bahwa meskipun pengetahuan masyarakat mengenai konservasi dapat berada pada tingkat yang baik, tanggung jawab pada aspek pengelolaan habitat, perubahan perilaku, dan respons terhadap ancaman kepunahan masih perlu diperkuat melalui pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan.

Kondisi tersebut memperlihatkan urgensi pelestarian penyu hijau yang tidak hanya berfokus pada penyelamatan individu penyu, tetapi juga pada perlindungan habitat, pengamanan sarang dan telur, pengelolaan tukik, pengurangan ancaman dari aktivitas manusia, serta penguatan partisipasi masyarakat. Pelestarian akan lebih berkelanjutan apabila masyarakat di sekitar kawasan konservasi memahami alasan perlindungan, memiliki keterampilan yang diperlukan, serta memperoleh ruang untuk berpartisipasi dalam kegiatan konservasi. Pengalaman konservasi secara global juga menunjukkan bahwa perlindungan induk dan telur di pantai, penguatan inisiatif berbasis masyarakat, pengurangan pemanfaatan yang tidak berkelanjutan, serta perlindungan habitat merupakan bagian penting dari keberhasilan pemulihan penyu hijau (IUCN, 2025). Dengan demikian, pelestarian penyu hijau perlu ditempatkan sebagai upaya ekologis sekaligus proses sosial yang melibatkan masyarakat pesisir secara aktif.

Di Kabupaten Tasikmalaya, upaya tersebut berkaitan dengan keberadaan Balai Besar KSDA Jawa Barat Wilayah XXII yang menangani kawasan konservasi di Desa Sindangkerta, Kecamatan Cipatujah. Kawasan Pantai Sindangkerta

memiliki arti penting sebagai habitat peneluran penyu hijau. Studi Nabiila et al. (2020) menunjukkan bahwa kawasan konservasi Pantai Sindangkerta memiliki kondisi habitat yang mendukung aktivitas peneluran penyu hijau dan memerlukan pengelolaan serta perlindungan yang konsisten. Keberadaan lembaga konservasi di kawasan ini menjadi penting karena kegiatan pelestarian tidak hanya mencakup perlindungan satwa, tetapi juga monitoring, pengamanan habitat, penyelamatan telur, penetasan, pelepasan tukik, edukasi konservasi, serta pelibatan masyarakat sekitar. Direktorat Jenderal KSDAE juga menegaskan bahwa pelestarian penyu di Suaka Margasatwa Sindangkerta merupakan tanggung jawab bersama dan membutuhkan sinergi berbagai pihak (Direktorat Jenderal KSDAE, 2017).

Pelibatan masyarakat di sekitar Balai Besar KSDA Jawa Barat Wilayah XXII menjadi penting karena masyarakat merupakan pihak yang berinteraksi secara langsung dan terus-menerus dengan kawasan pesisir. Mereka dapat berperan dalam pengawasan pantai, penyampaian informasi ketika terdapat penyu yang naik untuk bertelur, menjaga kebersihan kawasan, mendukung pengamanan telur dan tukik, serta mengikuti kegiatan edukasi dan pelatihan konservasi. Namun, keterlibatan tersebut tidak cukup apabila hanya bersifat insidental. Masyarakat perlu diberdayakan agar memiliki pengetahuan, kemampuan, kepercayaan, kesempatan, tanggung jawab, dan dukungan yang memungkinkan mereka menjadi mitra aktif dalam konservasi. Kerangka ini sejalan dengan konsep ACTORS yang menempatkan pemberdayaan melalui unsur Authority, Competence, Trust, Opportunity, Responsibility, dan Support sebagai bagian yang saling berkaitan dalam membentuk kapasitas masyarakat untuk bertindak (Cook & Macaulay, 1996; Maani, 2011).

Berdasarkan uraian tersebut, persoalan utama dalam penelitian ini tidak semata-mata terletak pada bagaimana penyu hijau dilestarikan, tetapi pada bagaimana masyarakat pesisir diberdayakan sehingga mampu mengambil bagian dalam proses pelestarian tersebut. Penelitian ini karena itu difokuskan pada pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat, bentuk-bentuk pemberdayaan yang diberikan kepada masyarakat pesisir, serta faktor pendukung dan penghambat yang memengaruhi proses pemberdayaan dalam upaya pelestarian penyu hijau di

Balai Besar KSDA Jawa Barat Wilayah XXII Desa Sindangkerta, Kecamatan Cipatujah, Kabupaten Tasikmalaya. Melalui fokus tersebut, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran sosiologis mengenai perubahan posisi masyarakat dari sekadar pihak yang berada di sekitar kawasan konservasi menjadi subjek yang memiliki kapasitas, partisipasi, dan tanggung jawab dalam menjaga keberlanjutan lingkungan pesisir.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan program dalam upaya pelestarian penyu hijau di Balai Besar KSDA Jawa Barat Wilayah XXII Desa Sindangkerta, Kecamatan Cipatujah, Kabupaten Tasikmalaya?
2. Bagaimana strategi pemberdayaan masyarakat pesisir dalam mendukung kegiatan pelestarian penyu hijau di Balai Besar KSDA Jawa Barat Wilayah XXII Desa Sindangkerta, Kecamatan Cipatujah, Kabupaten Tasikmalaya?
3. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pemberdayaan masyarakat pesisir di sekitar kawasan Balai Besar KSDA Jawa Barat Wilayah XXII Desa Sindangkerta, Kecamatan Cipatujah, Kabupaten Tasikmalaya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan program pemberdayaan masyarakat pesisir melalui pelestarian penyu hijau di Balai Besar KSDA Jawa Barat Wilayah XXII Desa Sindangkerta, Kecamatan Cipatujah, Kabupaten Tasikmalaya.
2. Untuk mengetahui strategi pemberdayaan masyarakat pesisir dalam mendukung kegiatan pelestarian penyu hijau di Balai Besar KSDA Jawa Barat Wilayah XXII Desa Sindangkerta, Kecamatan Cipatujah, Kabupaten Tasikmalaya.
3. Untuk menganalisis faktor pendukung dan penghambat dalam

pemberdayaan masyarakat pesisir di sekitar kawasan Balai Besar KSDA Jawa Barat Wilayah XXII Desa Sindangkerta, Kecamatan Cipatujah, Kabupaten Tasikmalaya.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

- a. Menambah wawasan dan referensi ilmiah dalam bidang ilmu sosial, khususnya yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat pesisir dalam upaya pelestarian penyu hijau di Balai Besar KSDA Jawa Barat Wilayah XXII Desa Sindangkerta, Kecamatan Cipatujah, Kabupaten Tasikmalaya
- b. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori dan praktik konservasi berbasis masyarakat, yang menekankan keseimbangan antara pelestarian lingkungan dan keberlanjutan sosial ekonomi.

2. Kegunaan Sosial

- a. Sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah, lembaga konservasi, dan masyarakat setempat dalam merancang program pemberdayaan masyarakat pesisir berbasis konservasi lingkungan
- b. Memberikan gambaran konkret mengenai pentingnya partisipasi masyarakat dalam menjaga kelestarian penyu hijau dan ekosistem pesisir.
- c. Mendorong munculnya kesadaran sosial serta tanggung jawab bersama dalam menjaga kelestarian sumber daya alam melalui kegiatan konservasi berkelanjutan.

E. Kerangka Berpikir

Penelitian ini menggunakan kerangka berpikir yang didasarkan pada teori ACTORS yang dikemukakan oleh Sarah Cook dan Steve Macaulay dalam bukunya

(Perfect Empowerment, 1996), yang kemudian diadaptasi dalam pemberdayaan masyarakat Indonesia oleh (Dt. Maani, 2011). Teori ACTORS merupakan pendekatan pemberdayaan yang memandang masyarakat sebagai subjek aktif yang mampu melakukan perubahan apabila mereka terlepas dari kendali yang kaku dan mendapatkan kebebasan untuk bertanggung jawab atas ide, keputusan, dan tindakan mereka sendiri dalam upaya meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan.

Pemberdayaan pesisir dapat dikaji melalui konsep ACTORS. Di mana ACTORS sendiri terdiri dari enam komponen pemberdayaan yang saling berkaitan yaitu *Authority* (wewenang untuk mengambil keputusan dalam pengelolaan konservasi), *Competence* (percaya diri kompetensi), *Trust* (kepercayaan antara pengelola konservasi dengan masyarakat), *Opportunity* (kesempatan ekonomi dari ekowisata dan ekonomi kreatif berbasis konservasi), *Responsibility* (tanggung jawab masyarakat dalam patroli dan perlindungan habitat penyu), dan *Support* (dukungan dari pemerintah, lembaga konservasi, dan solidaritas internal masyarakat) yang membentuk satu kesatuan strategi pemberdayaan holistik dan berkelanjutan (Maani, 2011).

Dalam pemberdayaan masyarakat melalui upaya pelestarian penyu hijau di Balai Besar KSDA Jawa Barat Wilayah XXII Desa SindangKerta, penerapan Teori ACTORS sangat relevan karena keenam komponen ini tidak berdiri sendiri tetapi saling terkait dan mendukung satu sama lain dalam menciptakan kondisi yang kondusif bagi pemberdayaan masyarakat yang efektif, dimana ketika masyarakat diberikan wewenang (*Authority*) untuk mengambil keputusan dalam pengelolaan konservasi maka mereka akan merasa dihargai dan terdorong untuk meningkatkan percaya diri dan kompetensi (*Competence*) melalui pembelajaran dan pelatihan agar mampu menjalankan wewenang tersebut dengan baik, seiring dengan meningkatnya kompetensi maka akan terbangun kepercayaan (*trust*) baik dari dalam diri masyarakat sendiri maupun dari pihak luar terhadap kapasitas mereka dalam mengelola konservasi yang kemudian membuka kesempatan (*Opportunity*) lebih luas untuk mengembangkan berbagai inisiatif konservasi dan ekonomi kreatif yang memberikan manfaat langsung bagi kesejahteraan mereka. Sehingga ketika masyarakat merasakan manfaat nyata dari program konservasi maka secara

otomatis akan tumbuh rasa tanggung jawab (Responsibility) yang lebih besar untuk menjaga dan melanjutkan program tersebut karena mereka memiliki kepentingan langsung terhadap keberhasilannya, dan semua proses ini perlu didukung oleh dukungan (Support) yang konsisten dari berbagai pihak terkait untuk memastikan bahwa program pemberdayaan dapat berjalan secara berkelanjutan dalam jangka panjang (Sari et al., 2025).

Oleh karena itu, konsep ACTORS menjadi pendekatan pemberdayaan yang memandang masyarakat sebagai subjek aktif yang mampu melakukan perubahan apabila mereka terlepas dari kendali yang kaku dan mendapatkan kebebasan untuk bertanggung jawab atas ide, keputusan, dan tindakan mereka sendiri dalam upaya meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan.

Gambar 1.1 Kerangka Berpikir



Sumber : Olahan Peneliti, 2026